

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN	iii
PENGUJIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Konsep Operasional	28
F. Metode Penelitian	30
BAB II TINJAUAN UMUM	36
A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru	36
B. Tinjauan Umum Kabupaten Kampar.....	47
C. Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	58
D. Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah Dalam Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007	65
E. Pengaturan Tentang Penegasan Batas Daerah Dalam Permendagri No 76 Tahun 2012	69
F. Persyaratan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan Dan Penyesuaian Daerah Dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	76
G. Kewenangan Dalam Penegasan Batas Wilayah Kecamatan	81
H. Sengketa Perbatasan Antar Daerah Dan Konsep Penyelesaiannya	88

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	95
	A. Implikasi Hukum Atas Perubahan Batas Antara Kecamatan Bukit Raya Dengan Kecamatan Siak Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar Dengan Kota Pekanbaru.	95
	B. Dasar Hukum Pertimbangan Keluarnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar Dengan Kota Pekanbaru.	146
	C. Arti Penting Penegasan Batas Wilayah Antar Daerah	165
	D. Arti Penting Batas Kecamatan dan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan	169
BAB IV	PENUTUP.....	172
	A. Kesimpulan	172
	B. Saran	175
	C. Analisa Yuridis	176
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	188
	LAMPIRAN.....	194

DAFTAR SINGKATAN

UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
PERDA	: Peraturan Daerah
PERPRES	: Peraturan Presiden
GUBRI	: Gubernur Riau
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
TNI-AU	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
AURI	: Angkatan Udara Republik Indonesia
DANLANUD	: Komandan Pangkalan Udara
FORKIPIMDA	: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
KPTS	: Keputusan
SK	: Surat Kuasa
KPA	: Konsorsium Pembaruan Agraria
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
SHM	: Sertifikat Hak Milik
HGB	: Hak Guna Bangunan
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
HMN	: Hak Menguasai Negara